

# Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan

Iriyani Abd. Kadir<sup>1</sup>, Abdul Kadir Ali<sup>2</sup>,  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nuku<sup>1,2</sup>,  
[nanirabiah@gmail.com](mailto:nanirabiah@gmail.com)<sup>1</sup>, [abdadirali@gmail.com](mailto:abdadirali@gmail.com)<sup>2</sup>

## Informasi Artikel

### Kata Kunci:

Partisipasi  
Masyarakat  
Pajak Bumi dan Bangunan

## ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan. Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari dua tujuan, yaitu :untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Tuguiha. Dalam pengambilan data, menggunakan data primer yang dilakukan secara observasi dan wawancara , selanjutnya data tersebut dianalisis secara Deskriptif Kualitatif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan kemudian diambil suatu kesimpulan. Dari pengolahan data yang dapat disimpulkan dalam partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tuguiha kurangbaik Baiknya masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Tuguiha itu tidak terlepas dari kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa pajak Bumi dan Bangunan merupakan hal yang wajib harus dibayar tiap tahunnya dan kesesuaian antara luas tanah dan bangunan yang dimiliki dengan jumlah yang harus dibayar serta pelayanan yang baik dan manfaat yang dapat dirasakan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri. Disamping itu kurangnya sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerinth kelurahan tuguiha menjadi salah satu kendala masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

© This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Penulis Korespondensi:

Iriyani Abd. Kadir  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Universitas Nuku  
Alamat Jalan Sultan Mansyur, Kota Tidore Kepulauan, Indonesia  
Email: [nanirabiah@gmail.com](mailto:nanirabiah@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pemungutan Pajak dalam ketentuan khusus perundang undangan yakni Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.Dimaksudkan pula sebagai

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka kabupaten/kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan yang luas terhadap daerahnya sendiri untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat yang ada di bawahnya yaitu perangkat desa atau kelurahan serta instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun di kuasai. Pembayar pajak ( wajib pajak ) tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi pajak yang di setorkan oleh warga negara untuk kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak yang berlaku. *Self Assessment System*, dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak.

Partisipasi menurut Ishomudin (dalam Isbandi, 2007: 20) dalam arti sederhana adalah keikutsertaan atau keterlibatan seseorang atau kelompok di dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan seseorang atau kelompok di dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan ikut bertanggung jawab akan turut menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Uphoff (dalam Nogi, 2007: 323) mengemukakan bahwa partisipasi adalah masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut dan ikut serta dalam mengevaluasi. Partisipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai Pemerintah karena kenyataannya Pemerintahlah yang sampai saat ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh Pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri, untuk rakyat banyak. Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Adapun beberapa faktor-faktor lain yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak hal ini Pangabean (1998:43) menyatakan

1. Tingkat Pendidikan
2. Tingkat Pendapatan
3. Jarak tempat tinggal
4. Sikap
5. Penyuluhan

Di Kelurahan Tuguiha, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum baik, faktor yang menghambat dalam membayar pajak adalah kurangnya Partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak tidak berjalan dengan efektif. Adanya sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Adanya sebagian masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, bukanlah usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Masalah-masalah yang di dapati di Kelurahan Tuguiha yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi yaitu: masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak membayar karena kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, masyarakat masih beranggapan bahwa para pejabat sering menyalahgunakan pajak, masyarakat melihat tidak adanya manfaat yang di rasakan karena masih banyak jalan yang rusak, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan juga ada masalah keuangan, serta sanksi yang di berikan masih ringan sehingga masyarakat cenderung mengangap sebelah mata / sepele.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan".

## **2. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah di Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan. Menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Tuguiha dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi melalui proses wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terkait, serta data berupa dokumen-dokumen, dan foto-foto yang peneliti dapatkan di lapangan, sehingga dari wawancara dan data tersebut gambaran yang akan peneliti gambarkan menjadi jelas dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan. Menurut Lofland dalam Moleong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Sumber data penelitian secara langsung maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Informan, antara lain : Kepala Kelurahan, Penagi Pajak, Tokoh Masyarakat (Wajib Pajak). Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut signifikan ilmiah atau teoritis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan, dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tuguiha**

Berdasarkan dari hasil wawancara dari informan yang berada di kelurahan tuguiha tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Tuguiha. Dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam membayar PBB di kelurahan tuguiha itu tidak terlepas dari kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hal yang wajib harus dibayar tiap tahunnya dan kesesuaian antara luas tanah dan bangunan yang dimiliki dengan jumlah yang harus dibayar serta pelayanan yang baik dan manfaat yang dapat dirasakan dari pembayaran PBB itu sendiri. Guna untuk meningkatkan pendapatan Negara untuk pembangunan Nasional, dan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan belum optimal. Faktor yang menghambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya partisipasi wajib pajak dimana tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak ini tidak berjalan dengan efektif. Partisipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai Pemerintah karena kenyataannya Pemerintahlah yang sampai saat ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama dari pembangunan. Partisipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai Pemerintah karena kenyataannya Pemerintahlah yang sampai saat ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama dari pembangunan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suryono (2001:124) Partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan Siagian (2003:30) mengungkapkan bahwa "Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan di dalam pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai subjek dan objek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan belum baik disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah kelurahan tuguiha dan petugas Pajak (fiskus) Bumi dan Bangunan belum bertindak tegas terhadap masyarakat

yang tidak ikut berpartisipasi dalam membayar PBB, pengawasan kesadaran dari masyarakatnya masih sangat kurang, dan tanggung jawab belum optimal.

Hal ini di buktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan .Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tuguiha belum optimal.faktor yang menghambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya partisipasi wajib pajak dimana tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak ini tidak berjalan dengan efektif. Wajib pajak harus meningkatkan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Karena, dengan membayar pajak dengan rutin wajib pajak berpartisipasi dalam pembangunan Daerah khususnya untuk Kota Tidore.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Tuguiha Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan**

Dilihat dari 5 aspek yang ada masih banyak faktor atau kendala-kendala yang di hadapipemerintah kelurahan dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan belum baik. Karena masih banyak kendala - kendala yang dihadapi dilihat dari segi komunikasi yang belum baik, koordinasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam hal ini wajib pajka masi kurang, pelayanan yang di berikan oleh petugas pajak masih lambat, dan faktor yang paling krusial adalah masih minimnya Tingkat kesadaran wajib pajak,

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut :

Tingkat pertisipasi masyarakat di Kelurahan Tuguiha dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal sesuai target yang diharapkan oleh pemerintah kelurahan maupun pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan. Adapun Faktor Kendala yang menyebabkan belum maksimalnya partisipasi masyarakat Kelurahan Tuguiha dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah : Komunikasi antara pemerintah kelurahan kepada masyarakat berupa penyuluhan atau sosialisasi tentang manfaat dan tujuan Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal. Sikap petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak belum maksimal. Kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan tuguiha masih sangat kurang. Rasa Tanggung jawab wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan tuguiha Belum sepenuhnya di miliki oleh wajib pajak.

## **REFERENSI**

- Ida Selvy Ayu Diani (2017) Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan, Depok: FISIP UI Press.
- Heri Suneni (2010) Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
- Herry Purwono 2010.Dasar-dasar perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga
- Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers, 1991 Hlm.14
- Mardiasmo 2011.Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardikanto.T., 1977. Petunjuk Penyuluhan, Surabaya : Usaha Nasional
- Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Panggabean, D., 1998. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Desa Hutan, Medan : USU.
- Putri Kemala Dewi Lubis (2018) Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
- R. Agoes Kamaroellah (2017) Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.
- Rusjdi, Muhammad. 2009. PPSP Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Edisi Kedua. Jakarta : PT. Indeks
- Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.. Jakarta Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Slamet, M. 2003. Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan.Bogor : IPB Press.
- Sugiyono.2016.Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R & D). CV Alfabeta, Bandung

- 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Slamat, Margono., 1990. Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa, Malang : LPM Universitas Brawijaya.
- Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan bangunan
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Dan Retrebusi Daerah
- Uphoff dan Cohen. 2007. Raising Factor Productivity in Irrigated Rice Production :Dalam Pembangunan Desa. Journal Ilmu Administrasi Negara. Masyarakat Dalam Pembangunan. Modayag Barat Manado
- Wahyudi, Kumorotomo. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Y. Sri Pudyatmoko, 2002, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta